

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Kampung merupakan sebuah kawasan pemukiman yang memiliki karakteristik ekonomi sosial masyarakat yang berbeda-beda. Berdasarkan Undang-Undang, Kampung atau yang dikenal dengan istilah lain adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam sistem pemerintahan nasional dan berada di daerah Kabupaten/Kota¹. Kampung juga menjadi unit sosial-politik terkecil di Indonesia.

Dari pengertian di atas menunjukkan bahwa kampung menjadi bagian yang tidak dapat dipisahkan dari kota. Sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari kota, kampung merupakan salah satu unsur dalam pembangunan struktur kota, yaitu sebagai kawasan permukiman di dalam kota yang terbentuk tanpa adanya perencanaan atau tumbuh sebelum perencanaan tersebut diaplikasikan². Sesuai dengan karakteristik demografinya yang berada di wilayah perkotaan, kampung memiliki jumlah penduduk dan permukiman yang padat, beberapa diantaranya juga terletak di pinggir jalan, sungai, atau rel kereta yang berdekatan dengan pusat perindustrian atau jasa.

Dengan keadaan yang seperti itu, kampung-kampung mengalami berbagai permasalahan yang kompleks. Tingginya laju pertumbuhan penduduk yang terjadi tidak diimbangi dengan ketersediaan permukiman beserta sarana prasarana pendukungnya. Keterbatasan dalam pemenuhan sarana prasarana permukiman perkotaan dapat berimbas pada permasalahan perekonomian yaitu kemiskinan. Selain

¹ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua

² Agung Cahyo Nugroho, "Kampung Kota Sebagai Sebuah Titik Tolak Dalam Membentuk Urbanitas dan Ruang Kota Berkelanjutan", (Jurnal Rekayasa, 2009), Vol. 13 N0. 3, hlm. 212

itu, masalah lain yang timbul dari permukiman yang padat penduduk adalah lingkungan disekitar kawasan kampung menjadi kumuh.

Dari permasalahan di atas muncul berbagai macam inovasi pembangunan untuk menanggulangi permasalahan kampung di perkotaan. Salah satunya melalui pembangunan yang merubah kampung-kampung tersebut menjadi kampung tematik. Tujuannya adalah untuk memberdayakan masyarakat sehingga dapat mandiri dalam memenuhi kebutuhan dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Dalam program pembangunan tersebut skema pelaksanaannya lebih menitikberatkan pada pemberian bantuan. Sehingga dalam prosesnya sering menimbulkan ketergantungan masyarakat terhadap bantuan yang diberikan. Hal ini dikarenakan gagasan perubahan yang muncul bukan berasal dari kesadaran masyarakat dan terkadang tidak sesuai dengan kebutuhan yang sebenarnya dibutuhkan.

Watson menyatakan bahwa terdapat beberapa kendala yang dapat menghambat terjadinya perubahan antara lain yang berasal dari kepribadian individu yaitu ketergantungan³. Adanya ketergantungan masyarakat dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan terhadap bantuan pemerintah menjadi penghambat dalam mewujudkan keterlibatan atau partisipasi aktif masyarakat. Karena rasa ketergantungan ini menjadikan masyarakat tidak memiliki inisiatif atau gagasan mandiri untuk melaksanakan pembangunan. Hal ini akan berdampak pada keberlangsungan program pembangunan. Program pembangunan yang berjalan menjadi tidak berkelanjutan karena partisipasi masyarakat yang rendah.

Dibutuhkan pembangunan berbasis masyarakat supaya program yang dilaksanakan dapat dijalankan masyarakat secara berkelanjutan. Pembangunan berbasis masyarakat dapat diartikan sebagai pembangunan yang direncanakan dan dilaksanakan oleh masyarakat itu sendiri dengan memanfaatkan potensi sumber daya

³ Soetomo, "*Strategi-Strategi Pembangunan Masyarakat*", (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), hlm. 214

seperti alam, manusia, kelembagaan, nilai-nilai sosial budaya dan lainnya yang dapat diakses oleh masyarakat setempat⁴.

Salah satu program pembangunan yang direncanakan dan dilaksanakan langsung oleh masyarakat adalah kegiatan Jimpitan. Kegiatan Jimpitan merupakan sebuah kegiatan untuk menghimpun dana swadaya masyarakat. Jimpitan mampu mengatasi permasalahan sosial masyarakat terutama di sektor ekonomi, karena pemanfaatan hasil Jimpitan nantinya akan dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan pembangunan masyarakat. Kegiatan Jimpitan tersebut dapat menjadi salah satu program pembangunan berbasis masyarakat karena pada prosesnya masyarakat dilibatkan secara langsung dalam pengambilan keputusan mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, sampai pada pemanfaatan hasil kegiatan.

Kegiatan Jimpitan merupakan tradisi masyarakat Indonesia yang sudah berlangsung sejak lama terutama di daerah-daerah pedesaan. Ahli budaya Jawa, Prapto Yuwono mengatakan tradisi Jimpitan dilihat dari akar sejarahnya telah menjadi simbol solidaritas dan ketangguhan masyarakat desa sejak zaman penjajahan dahulu dalam menghadapi kesulitan ekonomi⁵. Kegiatan Jimpitan ini bisa dipraktikkan oleh masyarakat di berbagai wilayah di Indonesia. Tidak hanya dilaksanakan oleh masyarakat pedesaan, kini telah banyak kampung-kampung di daerah perkotaan yang menerapkan kegiatan Jimpitan.

Jimpitan adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh anggota masyarakat dengan mengumpulkan beras dari satu rumah ke rumah lainnya pada malam hari dan biasanya dilakukan ketika pelaksanaan ronda malam⁶. Pada awalnya yang dikumpulkan hanya

⁴ Aprilia Theresia, et.al, "*Pembangunan Berbasis Masyarakat*", (Bandung: Alfabeta, 2014), hlm.23

⁵ Administrator, "*Jimpitan, Tradisi Pendukung Ekonomi Rakyat*", diakses dari <https://indonesia.go.id/kategori/komoditas/517/jimpitan-tradisi-pendukung-ekonomi-rakyat?lang=1>, pada tanggal 01 Oktober 2022

⁶ Surono, "*Build The Economic Integration With Jimpitan Model In Javanese Society*", (Chiang Mai Thailand: Towards an ASEAN Economic Community (AEC)-Prospects, Challenges, and Paradoxes in Development, Governance and Human Security, 2012), Makalah konferensi 2nd International Conference on International Relations and Development (ICIRD 2012), hlm. 3.

berupa beras, namun seiring dengan perkembangan waktu yang telah mengalami perubahan di beberapa daerah menggantinya menggunakan uang dengan alasan agar lebih praktis. Masyarakat mengumpulkan Jimpitan secara sukarela dengan besaran yang tidak ditetapkan atau sesuai dengan keikhlasan dari warga.

Jumlah uang yang dikumpulkan dari kegiatan Jimpitan tidaklah besar, tetapi jika pengumpulannya dilakukan secara kolektif dan rutin maka akan menjadi kekuatan besar dan bermanfaat bagi masyarakat di wilayah tersebut. Keberhasilan kegiatan Jimpitan ini ditunjukkan pada salah satu wilayah di Kabupaten Jember, Jawa Timur. Tepatnya pada masyarakat RW 23 Sadengan yang melaksanakan kegiatan Jimpitan beras sebagai salah satu upaya kemandirian dalam pemenuhan kebutuhan yang berbasis gotong royong.

Pelaksanaan Jimpitan telah menunjukkan bahwa dana hasil penjualan beras Jimpitan di sana mampu membuat RW 23 Sadengan Kabupaten Jember menjadi masyarakat yang mandiri. Mereka mampu menyediakan dana pembangunan untuk kebutuhan publik mulai dari sarana fasilitas warga, jalan, pengadaan barang hingga kegiatan-kegiatan masyarakat lainnya⁷. Hal ini menunjukkan bahwa Jimpitan mampu menciptakan kemampuan dan keberdayaan bagi masyarakat di suatu daerah dalam mengatasi permasalahan mereka secara mandiri.

Dalam konteks budaya Jimpitan menempatkan masyarakat sebagai subjek dan objek dari program pembangunan itu sendiri. Oleh karena itu, partisipasi masyarakat sangat dibutuhkan dalam pembangunan untuk mencapai pembangunan yang berkelanjutan, inklusif dan berdampak positif bagi masyarakat setempat. Partisipasi berarti keterlibatan seseorang atau sekelompok masyarakat dalam proses pembangunan yang berupa pernyataan maupun dalam bentuk kegiatan dengan memberikan masukan pikiran, waktu, tenaga, keahlian, modal atau materi serta ikut memanfaatkan dan

⁷ Henni Catur Ariati, “Pelaksanaan Kegiatan Jimpitan dalam Pemenuhan Kebutuhan Pembangunan Berbasis Komunitas”, (Universitas Jember: Ilmu Admnistrasi Negara, 2013), hlm. 112.

menikmati hasil-hasil pembangunan⁸. Partisipasi dapat diciptakan dengan menumbuhkan kesadaran masyarakat. Kesadaran masyarakat tentang permasalahan yang dihadapi dan pentingnya peran mereka dalam pembangunan dapat menjadi pendorong masyarakat untuk berpartisipasi. Masyarakat akan terlibat secara aktif ketika menyadari bahwa mereka memiliki hak, kewajiban, dan potensi untuk berkontribusi dalam proses pembangunan. Partisipasi masyarakat menjadi aspek penting dalam keberhasilan sebuah program.

Pelaksanaan kegiatan Jimpitan telah dipraktikkan di beberapa daerah di perkotaan salah satunya kampung yang ada di Kota Tangerang. Kampung tersebut adalah Kampung Jimpitan Kompak Berbagi Berkah (KB2) yang terletak di Kecamatan Batuaceper, Kota Tangerang. Kegiatan Jimpitan merupakan suatu program yang belum lama dilaksanakan oleh masyarakat Kampung Jimpitan KB2. Meskipun kegiatan Jimpitan menjadi aktivitas atau kebiasaan yang baru di tengah masyarakat, akan tetapi masyarakat Kampung Jimpitan KB2 dapat melaksanakannya secara konsisten. Hal ini dilatarbelakangi oleh tujuan awal pembentukan kegiatan Jimpitan yaitu sebagai dana swadaya masyarakat dalam membangun kampung. Adanya kegiatan Jimpitan telah menunjukkan manfaat luar biasa bagi perkembangan Kampung Jimpitan KB2.

1.2 Rumusan Masalah

Kegiatan Jimpitan menjadi salah satu program pembangunan yang dilaksanakan secara mandiri oleh masyarakat Kampung Jimpitan KB2. Perubahan yang terjadi pada Kampung Jimpitan KB2 yang terjadi tidak terlepas dari peran kegiatan Jimpitan yang berlangsung. Kegiatan Jimpitan memiliki kontribusi besar terhadap perkembangan kampung terutama dalam pembangunan fisik dan non fisik di kampung tersebut. Perubahan itu ditunjukkan oleh tersedianya kini sarana dan prasarana yang mendukung aktivitas sosial masyarakat di tengah kampung. Dengan adanya kegiatan Jimpitan mendorong masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam

⁸ I Nyoman Sumaryadi, “Efektifitas Implementasi Otonomi Daerah”, (Jakarta: Citra Utama, 2010), hlm. 46

seluruh proses pelaksanaan Jimpitan. Kini masyarakat Kampung Jimpitan KB2 dapat merasakan manfaat yang luar biasa dari kegiatan Jimpitan yang mereka laksanakan.

Partisipasi masyarakat sangat diperlukan dalam setiap program atau kegiatan yang dijalankan termasuk pada pelaksanaan kegiatan Jimpitan. Kegiatan Jimpitan ditujukan kepada masyarakat karena direncanakan dan dilaksanakan oleh masyarakat itu sendiri. Partisipasi masyarakat menjadi kunci dari keberhasilan program Jimpitan. Apabila partisipasi masyarakat rendah maka kegiatan Jimpitan akan mengalami kemandekan sehingga tidak bisa mencapai tujuan awal yang direncanakan. Begitupun sebaliknya, ketika partisipasi masyarakat tinggi maka kegiatan Jimpitan akan menghasilkan dampak bagi masyarakat. Masyarakat berpartisipasi dalam kegiatan sebagai usaha untuk mencapai tujuan bersama dan sebagai bentuk tanggung jawab sosial dalam entitas masyarakat.

Berdasarkan pernyataan di atas, maka pertanyaan penelitian yang diajukan yaitu sebagai berikut.

1. Bagaimana mekanisme kegiatan jimpitan yang dilakukan masyarakat Kampung Jimpitan KB2?
2. Bagaimana partisipasi masyarakat dalam kegiatan Jimpitan di Kampung Jimpitan KB2?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan pertanyaan penelitian di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Untuk mengetahui mekanisme kegiatan jimpitan yang dilakukan masyarakat Kampung Jimpitan KB2
2. Untuk mengetahui partisipasi masyarakat dalam kegiatan jimpitan di Kampung Jimpitan KB2

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Teoritis

Manfaat teoritis penelitian ini adalah untuk memberikan manfaat dalam perkembangan ilmu pengetahuan dari perspektif sosiologi pembangunan sosial dan perencanaan sosial, khususnya pembahasan mengenai konsep partisipasi masyarakat dalam pembangunan berbasis masyarakat melalui kegiatan Jimpitan. Penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi referensi bagi kalangan mahasiswa yang ingin mengembangkan penelitian terkait kegiatan Jimpitan sebagai program pembangunan yang melibatkan peran aktif masyarakat dalam menciptakan kemandirian untuk mengatasi permasalahan masyarakat.

1.4.2 Manfaat Praktis

Manfaat praktis dari penelitian ini adalah untuk memberikan pengetahuan bagi masyarakat umum mengenai partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan kegiatan Jimpitan yang diterapkan pada masyarakat di perkotaan. Penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan informasi kepada kampung-kampung lain dalam membangun kampung melalui pelibatan aktif masyarakat pada kegiatan Jimpitan. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi rekomendasi pelaksanaan kegiatan Jimpitan bagi pemerintah khususnya pada lingkup RT, RW, maupun Kelurahan.

1.5 Tinjauan Literatur Sejenis

Kegiatan Jimpitan dapat dijadikan sebagai modal sosial warga dalam mengatasi permasalahan yang terjadi sebagaimana penelitian yang dilakukan oleh Wiji Harsono dengan judul *Jimpitan, Modal Sosial yang Menjadi Solusi Permasalahan Masyarakat*⁹. Kegiatan jimpitan juga dapat dijadikan sebagai modal sosial dalam masyarakat. Kemudian dengan modal sosial tersebut diupayakan pemberdayaan masyarakat sebagai upaya dalam meningkatkan kemandirian sehingga masyarakat dapat

⁹ Wiji Harsono, "*Jimpitan, Modal Sosial yang Menjadi Solusi Permasalahan Masyarakat*", (Yogyakarta: Jurnal Kebijakan & Administrasi Publik, 2014), vol. 18, no. 2, hlm. 131.

memenuhi kebutuhan dengan kemampuannya sendiri. Kepercayaan sosial dalam pelaksanaan Jimpitan tidak terbentuk begitu saja, diperlukan proses dan upaya untuk terus menumbuhkan kepercayaan tersebut. Upaya yang dilakukan diantaranya adalah kejujuran dan amanah seluruh aktor dalam pelaksanaan hingga pendistribusian Jimpitan, kepentingan bersama lebih didahulukan dibandingkan dengan kepentingan individu atau kelompok tertentu, dan seluruh aktor patuh terhadap peraturan yang telah disepakati bersama. Aturan atau norma yang disepakati menjadi sebuah pedoman bagi masyarakat dalam menjalankan kegiatan Jimpitan. Jaringan sosial terbentuk dalam hubungan warga yang di dalamnya saling berinteraksi terutama antar aktor yang berbeda peran. Kegiatan Jimpitan sebagai modal sosial menjadi sebuah solusi dalam mengatasi permasalahan warga kampung tersebut.

Mekanisme pembangunan melalui kearifan lokal dapat dilakukan baik oleh pemerintah maupun masyarakat. Salah satu yang dapat dilakukan pemerintah yaitu melalui kegiatan *beas perelek* sebagaimana penelitian yang dilakukan oleh Nandang Rusnandar dengan judul *Beas Perelek: Pemberdayaan Masyarakat di Kabupaten Purwakarta*.¹⁰ *Beas Perelek* merupakan tradisi lama masyarakat Jawa Barat yang kini dilestarikan kembali oleh Bupati Purwakarta. Masyarakat Sunda memiliki falsafah hidup silih asah, silih asih, dan silih asuh yang sejalan dengan pelaksanaan *beas perelek*. Beberapa faktor yang membuat *beas perelek* dapat dijalankan kembali di Kabupaten Purwakarta adalah karena program tersebut merupakan tradisi lama masyarakat Jawa Barat sehingga terdapat rasa nostalgia bagi para warga. Selain itu, nilai-nilai yang terkandung dalam kegiatan *beas perelek* seperti semangat gotong royong, kebersamaan, kepedulian antar sesama, dan jiwa berkorban merupakan representasi dari falsafah hidup masyarakat Kabupaten Purwakarta. Faktor lain yang mempengaruhi *beas perelek* berjalan adalah peran pemerintah atau Bupati Purwakarta sebagai agen yang memiliki pengaruh cukup besar dalam membangkitkan dan

¹⁰ Rusnandar Nandang, "Beas Perelek: Pemberdayaan Masyarakat di Kabupaten Purwakarta" (Jawa Barat: Jurnal Patanjala, 2016), vol. 8, no. 3, hlm 301.

menggerakkan masyarakat untuk mengikuti program tersebut. *Beas perelek* menjadi program pemberdayaan pemerintah Kabupaten Purwakarta dalam menunjang pemerataan pembangunan. Kegiatan *beas perelek* bermanfaat bagi masyarakat untuk membantu warga ketika kekurangan bahan pangan karena *beas perelek* telah menjadi lembaga ketahanan pangan bagi masyarakat.

Konteks partisipasi masyarakat dapat dijadikan sebagai unsur pembentukan potensial kedepannya bagi suatu daerah. Pelibatan aktif masyarakat melibatkan dapat dilakukan untuk potensi dari desa seperti menjadi desa wisata. Sebagaimana penelitian yang dilakukan Sudesh Prabhakaran, Vikneswaran Nair, dan Sridar Ramachandran dengan judul *Community Participation in Rural Tourism: Towards a Conceptual Framework*¹¹. Partisipasi masyarakat merupakan prinsip dasar dan konsep sentral dalam pengembangan masyarakat terutama dalam pengembangan pariwisata masyarakat lokal. Partisipasi masyarakat secara langsung diperlukan untuk membangun sebuah desa wisata. Partisipasi dan keterlibatan masyarakat dalam pengembangan pariwisata terlihat dari proses pengambilan keputusan dan dalam pembagian manfaat pariwisata. Tidak hanya itu, partisipasi masyarakat dapat membawa manfaat ekonomi kepada masyarakat secara langsung dalam tingkat rumah tangga. Masyarakat secara bersama-sama saling bahu membahu dalam berpartisipasi karena didorong oleh adanya sebuah kepentingan ekonomi. Akan tetapi disisi lain partisipasi juga sangat bermanfaat dalam mengembangkan pariwisata dan memberikan pencitraan baik bagi desa dalam sektor pariwisata nasional.

Kegiatan Jimpitan juga dapat berdampak terhadap pembangunan lingkungan, sebagaimana penelitian yang dilakukan oleh Rakhmat Dwi Pambudi dengan judul *Pelestarian Jimpitan Sebagai Upaya Pemberdayaan Masyarakat dalam Pembangunan*

¹¹ Sudesh Prabhakaran, Vikneswaran Nair, dan Sridar Ramachandran, ” *Community Participation in Rural Tourism: Towards a Conceptual Framework*”, (Elsevier: Procedia-Social and Behavioral Sciences, 2014), vol. 144, hlm. 290.

di Kelurahan Patemon, Gunung Pati, Kota Semarang¹². Kegiatan Jimpitan sudah lebih dari lima tahun berjalan efektif di Kelurahan Patemon. Kegiatan Jimpitan yang dikelola dengan baik dapat menghasilkan manfaat untuk kepentingan masyarakat khususnya bagi pembangunan lingkungan. Perolehan hasil jimpitan dimanfaatkan masyarakat Kelurahan Patemon untuk pembangunan lingkungan fisik dan kegiatan pengembangan masyarakat lainnya. Pemanfaatan hasil Jimpitan diantaranya untuk pemeliharaan lingkungan seperti perbaikan jalan, drainase, penerangan jalan, dan pos kamling. Selain itu, dari hasil Jimpitan telah didirikan unit bisnis warga “Niki Tirta Rimba Bhakti” dan pembuatan mesin bor. Kegiatan Jimpitan mampu mengatasi permasalahan yang terjadi di tengah masyarakat. khususnya permasalahan mengenai lingkungan fisik. Selain itu, kegiatan Jimpitan mampu membentuk rasa kepedulian dan keterikatan warga diantara warga sehingga permasalahan sosial menjadi tanggung jawab dan beban moral bersama.

Pengelolaan Jimpitan dapat dilakukan oleh struktural pemerintah maupun struktural masyarakat. Salah satu bentuk pengelolaan melalui struktural masyarakat dapat dilakukan melalui koperasi sebagaimana penelitian yang dilakukan Hasan Bisri dan Husni dengan judul *Empowerment of Household Women through Sharia-Based Entrepreneurship Training in Banjar City, Indonesia*¹³. Partisipasi masyarakat melalui program pelatihan kewirausahaan ditunjukkan kepada Ibu Rumah Tangga dengan mendirikan sebuah koperasi. Kegiatan Jimpitan sebagai upaya masyarakat untuk melakukan penggalangan dana yang nantinya akan digunakan sebagai modal dalam menjalankan koperasi. Pengelolaan Jimpitan dilakukan oleh pengurus koperasi dengan mekanisme pada umumnya dimana setiap warga mengisi wadah kecil yang diberikan dengan nominal yang sesuai kemampuan dan keinginan warga. Kemudian secara rutin

¹² Rakhmat Dwi Pambudi, “*Pelestarian Jimpitan Sebagai Upaya Pemberdayaan Masyarakat dalam Pembangunan di Kelurahan Patemon, Gunung Pati, Kota Semarang*”, (Jawa Timur: Forum Ilmu Sosial, 2020), vol. 47, no. 1, hlm. 37.

¹³ Hasan Bisri dan Husni, “*Empowerment of Household Women through Sharia-Based Entrepreneurship Training in Banjar City, Indonesia*”, (IJICC: International Journal of Innovation, Creativity and Change, 2020), vol. 13, Issue. 5, hlm. 37.

wadah tersebut akan diambil oleh pengurus koperasi dalam jangka waktu tertentu. Dalam pengelolaannya, pengurus koperasi akan menyediakan sistem pembukuan untuk pencatatan setiap hasil Jimpitan. Pengelolaan Jimpitan akan dimanfaatkan sebagai modal koperasi syariah sehingga dapat meningkatkan berbagai jenis usaha masyarakat. Adanya koperasi yang beriringan dengan pelaksanaan Jimpitan menghidupkan nilai-nilai gotong royong sehingga masyarakat menjadi lebih mandiri.

Proses peningkatan partisipasi masyarakat dapat dilakukan melalui pengembangan berdasarkan potensi yang dimiliki masyarakat. Salah satunya pengembangan yang dilakukan melalui paguyuban yang memiliki keterampilan membuat sebagaimana penelitian yang dilakukan oleh Abdul Mufid dan Helina Himmatul Ulya dengan judul *Community Participation in Developments of Batik Villages through The Walet Sakti Kebumen Association*¹⁴. Proses peningkatan partisipasi masyarakat dalam pengembangan kampung batik melalui Paguyuban Walet Kebumen Sakti di Desa Gemesekti Kecamatan Kebumen Kabupaten Kebumen dibagi menjadi beberapa tahap pertama, Tahap Identifikasi Masalah sebagai tahap awal paguyuban dalam mengidentifikasi masalah dan membangun kesadaran masyarakat. Kedua, Tahap Perencanaan Program yang dilakukan oleh Paguyuban Walet Sakti Kebumen meliputi kemitraan, pelatihan, serta kerjasama dengan Pemerintah Kabupaten Kebumen dan lembaga pendidikan. Ketiga, Tahap Pelaksanaan Program, dan terakhir Tahap Evaluasi yang di dalam setiap perencanaan, pelaksanaan kegiatan di Kampung Batik melalui Paguyuban Walet Sakti Kebumen selalu diikuti dengan evaluasi. Peningkatan partisipasi masyarakat juga terdapat beberapa faktor yang mendorong peningkatan dan faktor yang menghambat peningkatan.

Partisipasi masyarakat dapat dilihat dalam program kampung yang di inisiasi oleh pemerintah salah satunya program Kampung Siaga Aktif. Sebagaimana penelitian

¹⁴ Mufid, A., Ulya, Helina H, “*Community Participation in Developments of Batik Villages through The Walet Sakti Kebumen Association*”, (Prosperity: Journal of Society and Empowerment,2023), vol. 3, no. 1, hlm. 71

yang dilakukan oleh Andri Irawan dengan judul *“Model Partisipasi Masyarakat Dalam Program Kampung Siaga Aktif di Kampung Salor Indah Distrik Kurik Kabupaten Merauke”*¹⁵. Kampung Salor telah memenuhi kriteria yang ditetapkan dalam Program Kampung Siaga Aktif. Keberhasilan Program Kampung Siaga Aktif sangat dipengaruhi oleh tingkat partisipasi masyarakatnya. Partisipasi masyarakat muncul karena adanya sumber informasi dan pengetahuan yang didapatkan oleh masyarakat. Selain itu, masyarakat juga berpartisipasi dalam penyampaian ide atau gagasan sebagai masukan dalam pengambilan keputusan pimpinan. Ide dan gagasan tersebut disampaikan secara langsung oleh masyarakat melalui Musyawarah Masyarakat Kampung (MMK). Walaupun demikian, partisipasi masyarakat masih terkendala oleh kesadaran masyarakat terutama masyarakat usia lanjut dalam pola hidup sehat.

Partisipasi masyarakat berperan penting dalam pembangunan kampung, termasuk pembangunan kampung wisata. Sebagaimana penelitian yang dilakukan oleh Kus Indarto dengan judul *“Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Kampung Wisata “Warna-Warni” Jodipan Kota Malang Jawa Timur”*¹⁶. Masyarakat berpartisipasi dalam proses pembangunan wisata. Partisipasi masyarakat dalam pembangunan Kampung Wisata “Warna-Warni” Jodipan terlihat mulai dari proses awal perencanaan, pelaksanaan hingga evaluasi. Masyarakat dilibatkan di dalam pembuatan keputusan melalui musyawarah yang dilakukan ketua RW. Kemudian pada pelaksanaan pembangunan, masyarakat melakukan kerja bakti untuk membersihkan lingkungan mereka sebelum pengecatan. Dalam pemanfaatan pembangunan, masyarakat banyak yang membuka warung makanan dan minuman, selain itu banyak pula masyarakat yang terbantu ketika berpartisipasi dalam pemanfaatan pembangunan

¹⁵ Andri Irawan, “Model Partisipasi Masyarakat Dalam Program Kampung Siaga Aktif di Kampung Salor Indah Distrik Kurik Kabupaten Merauke”, (Jurnal Sosial Politik, 2019), Vol. 5 No. 1, hlm. 40

¹⁶ Kus Indarto, “Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Kampung Wisata “Warna-Warni” Jodipan Kota Malang Jawa Timur”, (Dialektika: Jurnal Ekonomi dan Ilmu Sosial, 2017), Vol. 2, No. 1, hlm 90

yang telah dilakukan. Masyarakat juga berpartisipasi dalam evaluasi. Setelah dilakukan pembangunan, warga diundang dalam rapat yang dilakukan di lingkungan RW untuk membahas atau mengevaluasi tentang program-program yang telah dilaksanakan.

Selain dengan kegiatan Jimpitan, terdapat beberapa wadah yang mampu menjadi penyalur partisipasi masyarakat. Seperti keberadaan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) sebagaimana penelitian yang dilakukan oleh Yaya S., Irawanto, & Samuel Risal dengan judul "*Partisipasi Masyarakat dalam Pelaksanaan Pembangunan di Kelurahan Panamas Kecamatan Selat Kabupaten Kapuas*"¹⁷. Melalui wadah Lembaga Pemberdayaan Masyarakat yang terdiri dari tokoh masyarakat dan pemuka masyarakat. Tingkat partisipasi masyarakat di Kelurahan Panamas Kecamatan Selat Kabupaten Kapuas secara umum dapat berjalan dengan baik. Masyarakat berpartisipasi dalam pembangunan kelurahan dalam bentuk uang dan juga tenaga. Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi tingkat keterlibatan masyarakat dalam pembangunan, faktor internal yang meliputi kesadaran, pendidikan dan penghasilan atau pendapatan. Sedangkan terdapat faktor eksternal yang meliputi kepemimpinan pemerintah dan peralatan/fasilitas.

Pembangunan Kampung Kota memerlukan peran aktif dari masyarakat secara langsung guna mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan. Sebagaimana penelitian yang dilakukan oleh Sri Yuliani, Purwanto Setyo Nugroho, & Tri Yuni Iswati dengan judul "*Identifikasi Peran Masyarakat Dalam Pembangunan Kampung Kota Berkelanjutan*"¹⁸. Pembangunan Kampung Kota dikembangkan dengan mempertimbangkan peluang dan potensi kampung. Letak kampung yang strategis dapat menjadi peluang dan potensi yang dimanfaatkan oleh masyarakat untuk

¹⁷ S. Yaya., Irawati, & Samuel Risal, "*Partisipasi Masyarakat dalam Pelaksanaan Pembangunan di Kelurahan Panamas Kecamatan Selat Kabupaten Kapuas*", (Indonesian Journal of Applied and Industrial Sciences, 2023), Vol. 2, No. 3, hlm. 330

¹⁸ Sri Yuliani, Purwanto S. N., Tri Yuni Iswati, "*Identifikasi Peran Masyarakat Dalam Pembangunan Kampung Kota Berkelanjutan*", (Arsitektura: Jurnal Ilmiah Arsitektur dan Lingkungan Binaan, 2021), Vol. 19, No. 2, hlm. 307

membangun kampung. Peran masyarakat yang ditemukan bersifat berjenjang sesuai dengan kedudukan masyarakat sebagai pengurus dan warga kampung. Sebagai pengurus kampung, mulai dari tingkat RT hingga RW, masyarakat ini berpotensi menjadi quality control, yakni satuan petugas yang melakukan kontrol terhadap ruang-ruang komunal secara terusmenerus. Tugas kontrol meliputi pengawasan penggunaan ruang komunal, pemeriksaan dan perawatan. Sedangkan masyarakat sebagai warga kampung, mempunyai tugas untuk membantu dan mematuhi regulasi setempat, tidak menggunakan ruang komunal secara individu tanpa mengindahkan kepentingan masyarakat lainnya. Kedua lapisan masyarakat ini harus dapat menjaga kebersamaan secara berkelanjutan, agar tercipta kampung yang sehat, asri dan ekologis. Beberapa hal yang utama dalam pembangunan kampung harus dimusyawarahkan meliputi sistem keamanan, ketertiban, pola pengelolaan utilitas lingkungan yang mencakup drainase, ruang hijau dan ruang komunal.



Tabel 1. 1 Tinjauan Literatur Sejenis

No	Judul	Peneliti	Jenis Tinjauan Pustaka	Jenis Penelitian	Konsep	Persamaan dan Perbedaan
1	Jimpitan, Modal Sosial yang Menjadi Solusi Permasalahan Masyarakat	Wiji Harsono	Jurnal Kebijakan & Administrasi Publik, Vol 18 No 2, November 2014	Kualitatif yang bersifat induktif	Konseptualisasi modal sosial dan partisipasi masyarakat	Persamaan penelitian peneliti dengan penelitian ini adalah pembahasan konteks mengenai kegiatan Jimpitan. Perbedaannya adalah penelitian ini lebih berfokus pada kegiatan Jimpitan sebagai modal sosial sedangkan penelitian peneliti lebih berfokus pada partisipasi masyarakat melalui kegiatan Jimpitan.
2	<i>Beas Perelek</i> , Pemberdayaan Masyarakat di Kabupaten Purwakarta	Nandang Rusnandar	Jurnal Patanjala, Vol 8 No 3. September 2016	Penelitian kualitatif	Pemberdayaan Masyarakat dan Partisipasi Masyarakat	Persamaan penelitian peneliti dengan penelitian ini adalah membahas kegiatan dengan mekanisme yang sama. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian peneliti adalah objek kegiatan yaitu <i>Beas Perelek</i> merupakan program pemberdayaan masyarakat dari pemerintah sedangkan

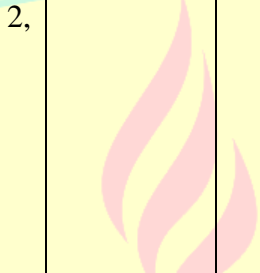
						pada penelitian peneliti kegiatan Jimpitan diinisiasi langsung oleh masyarakat.
3	Community Participation in Rural Tourism: Towards a Conceptual Framework	Sudesh Prabhakaran, Vikneswaran Nair, dan Sridar Ramachandran	Jurnal Procedia – Social and Behavioral Sciences. 144 (2014) 290 - 295 5 th Asia Euro Conference	Penelitian <i>Mixed-Method</i>	Partisipasi Masyarakat	Persamaan penelitian ini dengan penelitian peneliti adalah aspek partisipasi masyarakat dalam membangun sebuah desa atau kampung. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian penelitian peneliti adalah pada penelitian ini kajian yang difokuskan yaitu partisipasi masyarakat dalam membangun sebuah desa wisata sedangkan pada penelitian peneliti berfokus pada partisipasi masyarakat yang terdapat pada aspek pemberdayaan dalam sebuah kegiatan yang ada di masyarakat.
4	Pelestarian Jimpitan Sebagai Upaya Pemberdayaan Masyarakat	Rakhmat Dwi Pambudi	Jurnal Forum Ilmu Sosial Vol 47 No 1. Juni 2020	Penelitian Kualitatif	Partisipasi masyarakat dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pembangunan	Persamaan penelitian ini dengan penelitian peneliti adalah membahas kegiatan Jimpitan dalam pembangunan. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian peneliti adalah pada penelitian ini penekanan

	dalam Pembangunan di Kelurahan Patemon, Gunung Pati, Kota Semarang					partisipasi masyarakat melalui Jimpitan pada pembangunan khususnya lingkungan sedangkan pada penelitian peneliti berfokus pada kemandirian kampung sebagai implikasi dari partisipasi masyarakat dalam kegiatan Jimpitan.
5	Empowerment of Household Women through Sharia-Based Entrepreneurship Training in Banjar City, Indonesia	Hasan Bisri dan Husni	International Journal of Innovation, Creativity and Change Vol 13 Issue 5, 2020	Participatory Action Research (PAR)	Partisipasi Masyarakat, Pemberdayaan Masyarakat dan Teori Pembagian Kerja	Persamaan penelitian ini dengan penelitian peneliti adalah partisipasi masyarakat dalam upaya memberdayakan masyarakat. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian peneliti adalah berfokus pada partisipasi Perempuan Rumah Tangga dalam upaya pemberdayaan masyarakat sedangkan pada penelitian peneliti adalah partisipasi masyarakat kampung. Perbedaan lainnya adalah pada aspek lembaga pengelola dana Jimpitan, pada penelitian ini dana Jimpitan dikelola oleh koperasi sedangkan pada

						penelitian peneliti dikelola oleh pengurus RT.
6	Community Participation in Developments of Batik Villages through The Walet Sakti Kebumen Association	Abdul Mufid dan Helina Himmatul Ulya	Prosperity: Journal of Society and Empowerment, Vol. 3, No. 1, 2023	Penelitian Kualitatif	Partisipasi Masyarakat	Persamaan penelitian ini dengan penelitian peneliti adalah sama-sama membahas mengenai partisipasi masyarakat dalam pembangunan kampung. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian peneliti adalah peningkatan partisipasi masyarakat kampung dilakukan melalui salah satu paguyuban yang ada sedangkan pada penelitian peneliti peningkatan partisipasi dilakukan oleh seluruh masyarakat kampung secara langsung melalui Jimpitan.
7	Partisipasi Masyarakat dalam Pelaksanaan Pembangunan di	Yaya S., Irawanto. & Samuel Risal	Indonesian Journal of Applied and Industrial Sciences,	Penelitian Kualitatif	Partisipasi Masyarakat, Pembangunan	Persamaan penelitian ini dengan penelitian peneliti adalah. Sedangkan perbedaan penelitian ini dengan penelitian peneliti pada penelitian ini wadah dan penyalur partisipasi masyarakat melalui keberadaan

	Kelurahan Panamas Kecamatan Selat Kabupaten Kapuas		Vol. 2, No. 3, 2023			Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM). Sedangkan pada penelitian peneliti kegiatan Jimpitan sebagai wadah dalam meningkatkan partisipasi aktif masyarakat untuk pembangunan kampung.
8	Model Partisipasi Masyarakat Dalam Program Kampung Siaga Aktif di Kampung Salor Indah Distrik Kurik Kabupaten Merauke	Andri Irawan	Jurnal Sosial Politik, Vol. 5, No. 1, 2019	Penelitian Kualitatif	Konsep Partisipasi Masyarakat	Persamaan penelitian ini dengan penelitian peneliti adalah sama-sama membahas partisipasi masyarakat dalam program pembangunan kampung. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian peneliti adalah penelitian ini menekankan partisipasi masyarakat dalam program kampung yang diupayakan oleh pemerintah yaitu Kampung Siaga Aktif, sedangkan pada penelitian peneliti partisipasi masyarakat pada kegiatan swadaya masyarakat yaitu Jimpitan.

9	Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Kampung Wisata “Warna-Warni” Jodipan Kota Malang Jawa Timur	Kus Indarto	Dialektika: Jurnal Ekonomi dan Ilmu Sosial, Vol. 2, No. 1, 2017	Penelitian Kualitatif Deskriptif	Partisipasi Masyarakat dan Pembangunan	Persamaan penelitian ini dengan penelitian peneliti adalah membahas partisipasi masyarakat dalam program pembangunan kampung. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian peneliti adalah penelitian ini berfokus pada pembangunan kampung wisata yang melakukan perubahan wajah kampung dengan pengecatan. Sedangkan penelitian peneliti berfokus pada pembangunan kampung sebagai upaya perbaikan lingkungan melalui dana swadaya hasil Jimpitan.
10	Identifikasi Peran Masyarakat dalam Pembangunan Kampung Kota Berkelanjutan	Sri Yuliani, Purwanto Setyo Nugroho, Tri Yuni Iswati	Arsitektura: Jurnal Ilmiah Arsitektur dan Lingkungan Binaan, Vol.	Penelitian Kualitatif	Kampung Kota, Partisipasi Masyarakat	Persamaan penelitian ini dengan penelitian peneliti adalah membahas peran masyarakat Kampung Kota untuk mewujudkan pembanguna berkelanjutan. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian peneliti adalah penelitian ini menjelaskan peran masyarakat secara langsung dalam

			19, No. 2, 2021		pembangunan berkelanjutan. Sedangkan pada penelitian peneliti lebih melihat peran masyarakat dalam pembangunan kampung melalui program atau kegiatan tradisi Jimpitan.
--	--	--	--------------------	--	--

Sumber: Diolah dari Tinjauan Penelitian (2022)



1.6 Kerangka Konseptual

1.6.1 Kegiatan Jimpitan

Jimpitan merupakan salah satu bentuk tradisi masyarakat Jawa yang sudah berlangsung sejak lama. Jimpitan berasal dari kata Jimpit yang memiliki arti mencubit dengan tiga jari (ibu jari, jari telunjuk, dan jari tengah). Hal ini mengacu pada sesuatu yang diberikan dalam jumlah yang kecil¹⁹. Jimpitan pada awalnya dilakukan dengan cara mengumpulkan beras dan hal ini masih berlangsung pada masyarakat Jawa di pedesaan.

Seiring dengan perkembangannya, kegiatan Jimpitan mulai banyak dilakukan oleh masyarakat perkotaan. Sistem Jimpitan di beberapa daerah telah banyak digantikan dengan uang. Alasannya supaya lebih memudahkan dan praktis dalam pengelolaan maupun pendataannya. Jimpitan dapat memperkuat perekonomian masyarakat terutama pada masa paceklik. Dana dari hasil pengumpulan Jimpitan lebih banyak digunakan untuk melakukan pengembangan masyarakat seperti pembangunan wilayah atau kegiatan sosial masyarakat. Selain itu, Jimpitan juga berfungsi sebagai salah satu wadah yang efektif dalam membangun keharmonisan dan hubungan sosial di antara anggota masyarakat.

Jimpitan adalah sebuah program swadaya masyarakat yang dilaksanakan secara sukarela oleh masyarakat dengan memberikan beras atau uang dalam jumlah kecil. Beras atau uang tersebut kemudian diletakkan pada sebuah wadah yang tergantung di dinding rumah. Terdapat petugas Jimpitan yang akan berkeliling dari satu rumah warga ke rumah lainnya untuk mengumpulkan hasil Jimpitan. Pengumpulan Jimpitan biasa dilakukan secara rutin setiap bulan, minggu atau bahkan setiap hari. Jimpitan biasa dikelola oleh pengurus RT, RW atau desa setempat secara transparan.

¹⁹ Surono, *Op.cit.*, hlm. 2.

Hasil pengumpulan Jimpitan kemudian diserahkan kepada bendahara desa, selanjutnya bendahara desa akan membuat laporan hasil pengelolaan Jimpitan, baik jumlah pemasukan maupun pengeluaran kepada penduduk desa setiap bulan²⁰. Melalui sistem Jimpitan, masyarakat Jawa pada umumnya dapat membangun desa atau daerahnya sendiri, meningkatkan kesejahteraan sosial, serta menciptakan keharmonisan masyarakatnya. Maka dapat dikatakan bahwa Jimpitan adalah asosiasi spasial yang karakternya bersifat mengumpulkan dana dari masyarakat setempat untuk kepentingan masyarakat bersama.

Pada skema pelaksanaannya terdapat unsur-unsur yang membangun kegiatan Jimpitan. Unsur-unsur tersebut dibagi menjadi dua yaitu aktor dan kelembagaan. Unsur aktor dibagi menjadi dua kategori yaitu peserta Jimpitan dan aktor penggerak. Peserta Jimpitan dalam hal ini adalah seluruh masyarakat dalam suatu wilayah yang berperan memberikan Jimpitan maupun dalam mengumpulkan Jimpitan. Sedangkan aktor penggerak adalah orang yang menginisiasi pembentukan Jimpitan sekaligus mengajak seluruh masyarakat untuk terlibat dalam proses pelaksanaan dan mengawasi serta bertanggung jawab terhadap keberlangsungan Jimpitan.

Sedangkan pada unsur kelembagaan dalam kegiatan Jimpitan terdapat beberapa aspek yang mendukung pelaksanaan Jimpitan yaitu aturan, prosedur, dan fungsi. Dalam kegiatan Jimpitan terdapat aturan yang disepakati bersama oleh masyarakat. Aturan ini mencakup besaran Jimpitan yang harus diberikan dan jadwal bagi petugas untuk mengumpulkan Jimpitan. Selain itu, diperlukan adanya prosedur yang jelas sehingga masyarakat dapat menjalankan kegiatan Jimpitan dengan mudah. Prosedur tersebut mencakup tahapan masyarakat dalam mengumpulkan Jimpitan mulai dari waktu pengumpulan Jimpitan, lalu proses pengumpulan Jimpitan yang bisa dilakukan secara langsung dari seluruh

²⁰ Surono, *Ibid.*, hlm. 3.

wilayah atau dibagi menjadi beberapa wilayah bagian untuk pengambilannya, dan hasil Jimpitan yang kemudian diserahkan kepada bendahara RT atau desa. Sementara itu, kegiatan Jimpitan memiliki fungsi sebagai dana swadaya masyarakat dalam upaya pemenuhan kebutuhan pembangunan. Jimpitan dapat difungsikan sebagai dana sosial termasuk untuk kegiatan pengembangan masyarakat dan dana pembangunan lingkungan.

1.6.2 Partisipasi Masyarakat

Partisipasi merupakan keterlibatan seseorang secara sadar ke dalam konteks sosial dalam situasi tertentu²¹. Ketika seseorang menemukan dirinya dengan atau dalam kelompok ia bisa berpartisipasi melalui berbagai proses berbagi dengan orang lain dalam hal tradisi, nilai, kesetiaan, perasaan, kepatuhan, maupun tanggung jawab bersama. Sedangkan masyarakat adalah kesatuan hidup manusia yang berinteraksi menurut suatu sistem adat istiadat tertentu yang bersifat kontinyu dan terikat oleh suatu rasa identitas bersama²². Partisipasi masyarakat dapat diartikan sebagai keterlibatan masyarakat dalam proses pengidentifikasian masalah dan potensi yang ada di masyarakat, pemilihan dan pengambilan keputusan tentang alternatif solusi untuk menanggapi masalah, pelaksanaan dalam upaya mengatasi masalah, dan keterlibatan masyarakat dalam proses evaluasi terhadap perubahan yang terjadi²³.

Partisipasi masyarakat juga dapat didefinisikan dalam konteks budaya. Masyarakat secara aktif melahirkan dan melestarikan kebudayaan. Orang berpartisipasi dalam budaya karena orang memiliki makna atau simbol-simbol yang dikonsesnsuskan, seolah makna tersebut yang mendorong masyarakat

²¹ Wazir Ws Ach, “*Panduan Penguatan Menejemen Lembaga Swadaya Masyarakat*”, (Jakarta: Sekretariat Bina Desa dengan dukungan AusAID melalui Indonesia HIV/AIDS and STD Prevention and Care Project, 1999), hlm. 29

²² Koentjaraningrat, “*Pengantar Ilmu Antropologi*”, (Jakarta: Rineka Cipta, 2009), hlm. 13

²³ Isbandi Rukminto Adi, “*Perencanaan Partisipatoris Berbasis Aset Komunitas. Dari Pemikiran Menuju Penerapan*”, (Jakarta: FISIP UI Press, 2007), hlm. 27

berpartisipasi. Terdapat interpretasi terhadap sistem simbol dan makna yang ada dalam suatu kegiatan budaya tersebut. Menurut Clifford Geertz partisipasi masyarakat dalam konteks budaya adalah masyarakat bukanlah hanya objek dari analisis, tetapi masyarakat sebagai subjek aktif yang berkontribusi dalam menciptakan, memaknai, dan menjaga budaya mereka sendiri melalui interaksi sosial dan interpretasi simbolik yang kompleks²⁴. Untuk memahami partisipasi masyarakat dalam konteks budaya menurut Clifford Geertz, perlu memahami konsepnya tentang interpretasi simbolik dalam kehidupan manusia. Geertz menekankan pentingnya memahami budaya sebagai sistem simbolik yang rumit, di mana setiap tindakan dan simbol memiliki makna sosial yang mendalam.

Partisipasi masyarakat dalam budaya melibatkan pemahaman tentang makna-makna budaya dan simbol-simbol yang melekat dalam praktik-praktik sosial masyarakat²⁵. Praktek budaya tidak dapat dipahami secara terpisah dari konteks budayanya. Seperti pada contoh partisipasi dalam ritual, upacara, atau kegiatan gotong royong memiliki makna budaya dan simbolik yang khusus bagi masyarakat setempat.

Dalam penelitiannya, Geertz menerapkan metode deskripsi tebal (*thick description*) untuk memahami partisipasi masyarakat dalam budaya. Metode ini melibatkan deskripsi mendalam tentang praktek-praktek sosial dan konteks budaya yang menyertainya. Budaya menurutnya adalah sebuah teks yang harus diuraikan dengan metode tersebut sehingga memahami arti dari simbol-simbol yang digunakan oleh masyarakat²⁶. Dengan menerapkan deskripsi tebal, maka

²⁴ Clifford Geertz, "*Tafsir Kebudayaan, diterjemahkan oleh Francisco Budi Hardiman*", (Yogyakarta: Kanisius, 1992), hlm. 5.

²⁵ *Ibid*, hlm. 12.

²⁶ *Ibid*, hlm 8.

berusaha untuk menangkap esensi dan makna di balik praktek budaya dan bagaimana masyarakat berpartisipasi dalam konteks tersebut.

Intepretasi sosial penting untuk ditekankan dalam memahami partisipasi masyarakat dalam budaya. Geertz berargumen bahwa peneliti harus memahami bagaimana masyarakat memberikan makna dan tafsiran terhadap tindakan sosial mereka sendiri. Partisipasi masyarakat dalam budaya tidak hanya sekadar aksi fisik, tetapi juga mencerminkan intepretasi sosial dan nilai-nilai yang melekat pada praktek-praktek tersebut. Partisipasi masyarakat dalam budaya juga tidak dapat dipisahkan dari konteks budaya yang lebih luas. Budaya lokal menjadi konteks di mana partisipasi masyarakat terjadi dan dipengaruhi oleh nilai-nilai, norma-norma, dan tata nilai yang melekat dalam budaya tersebut²⁷.

Gagasan partisipasi masyarakat menurut Clifford Geertz melibatkan pemahaman tentang bagaimana masyarakat berpartisipasi dalam kehidupan sosial mereka. Penekanan pentingnya dengan memahami makna dan simbol-simbol dalam budaya untuk menggali bagaimana masyarakat berpartisipasi. Terdapat beberapa elemen penting dari konsep partisipasi masyarakat jika dilihat dari konteks budaya diantaranya sebagai berikut²⁸:

1. Makna Kultural (*Cultural Meaning*)

Geertz melihat kebudayaan sebagai sistem pemaknaan yang harus dipahami secara semiotik, yakni sebagai jejaring makna atau pola-pola makna yang terwujud sebagai simbol-simbol sehingga analisis terhadapnya haruslah bersifat intepretatif, yaitu menelusuri makna, dan menemukan maksud di balik apa yang dilakukan orang, signifikansi ritual, struktur dan kepercayaannya bagi semua kehidupan dan

²⁷ Geertz, Clifford, "*Local Knowledge, Further Essay in Interpretive Anthropology*" (3th edition. Perseus Books, L.L.C., 2000)

²⁸ Clifford Geertz, *Op.cit*,

pemikiran²⁹. Pentingnya untuk memahami makna di balik tindakan dan simbol-simbol dalam budaya. Setiap tindakan atau aktivitas dalam masyarakat memiliki makna kultural yang mendalam dan melibatkan proses interpretasi. Melalui interpretasi ini, masyarakat dapat memahami tindakan orang lain dan meresponsnya dengan cara yang tepat.

2. Sistem Simbolik (*Symbolic System*)

Konsep partisipasi masyarakat berfokus pada sistem simbolik yang digunakan oleh masyarakat untuk menyampaikan makna dan memahami dunia mereka. Simbol-simbol ini bisa berupa bahasa, ritual, simbol visual, atau tindakan sosial lainnya. Partisipasi masyarakat melibatkan pengetahuan dan penggunaan sistem simbolik ini untuk berinteraksi dan berkomunikasi dengan orang lain.

Kebudayaan digunakan manusia untuk dapat beradaptasi dengan lingkungannya, dengan berbagai material hasil kebudayaan yang bentuknya beragam yang tentu saja diproduksi oleh manusia sendiri. termasuk di dalamnya simbol-simbol yang di produksi, digunakan, dan direproduksi oleh manusia. Geertz mengatakan bahwa tanpa manusia, tidak ada kebudayaan, dan tanpa kebudayaan tidak akan ada manusia³⁰.

3. Peran dan Struktur Sosial (*Roles and Social Structure*)

Dimensi partisipasi masyarakat juga melibatkan pemahaman tentang peran dan struktur sosial yang ada dalam masyarakat. Setiap individu dalam masyarakat memiliki peran sosial yang ditentukan oleh norma dan nilai-nilai budaya. Partisipasi masyarakat bergantung pada

²⁹ Zulhijra, “Budaya Religius Sebagai Dasar Pembentukan Perilaku Beragama di SMA Ar-Rohmah Putra Malang”, (Malang: Disertasi Universitas Muhammadiyah Malang, 2022).

³⁰ Kurnia Novianti, “Refleksi tentang Konsep Kebudayaan: Sebuah Catatan Autoetnografi”, (Jurnal Masyarakat & Budaya, 2013), Vol. 15, No. 2, hlm. 230.

pemahaman dan pelaksanaan peran sosial ini dalam kehidupan sehari-hari.

4. Interaksi Sosial (*Social Interaction*)

Partisipasi masyarakat terjadi melalui interaksi sosial antara individu-individu dalam masyarakat. Dalam hal ini memahami bagaimana interaksi sosial terjadi, bagaimana makna dan simbol-simbol diterjemahkan selama interaksi, dan bagaimana proses tersebut membentuk dan mempengaruhi hubungan sosial.

5. Konteks Budaya (*Cultural Context*)

Partisipasi masyarakat tidak dapat dipisahkan dari konteks budaya yang lebih luas. Setiap tindakan atau perilaku memiliki latar belakang budaya tertentu yang membentuk cara masyarakat berpikir, bertindak, dan merespons lingkungan mereka. Memahami konteks budaya ini penting dalam memahami partisipasi masyarakat secara menyeluruh.

6. Pengalaman Bersama (*Shared Experience*)

Bagian terakhir dari dimensi partisipasi masyarakat menekankan pada pengalaman bersama yang membentuk identitas kolektif dan solidaritas sosial dalam masyarakat. Pengalaman bersama ini melibatkan pembagian cerita, peristiwa, dan nilai-nilai yang memperkuat ikatan sosial antarindividu.

Konsep partisipasi masyarakat dalam pendekatan budaya lebih menekankan pada pendekatan interpretatif dalam memahami masyarakat. Hal ini berarti memahami bagaimana masyarakat memberikan makna pada dunia mereka, dan bukan sekadar melihat perilaku mereka dari luar tanpa memahami konteks budaya yang lebih dalam³¹. Melalui pendekatan interpretatif dan

³¹ Clifford Geertz, "*Local Knowledge, Further Essay in Interpretive Anthropology*", (3th edition: Perseus Books, L.L.C, 2000), hlm. 17.

metode deskripsi tebal, telah memberikan pandangan mendalam tentang bagaimana masyarakat berpartisipasi dalam budaya dan bagaimana praktek-praktek budaya tersebut menjadi bagian integral dari kehidupan sosial masyarakat. Pemahaman ini telah memberikan wawasan yang penting tentang dinamika dan kompleksitas partisipasi masyarakat dalam konteks budaya lokal.

1.6.3 Kemandirian: Dalam Konteks Kewilayahan

Istilah kemandirian dalam ilmu sosial sering dihubungkan dengan istilah otonom, yang berarti bebas atau tidak bergantung, berdiri sendiri dan dapat mengelola diri sendiri serta keberlanjutan diri. Pada perspektif pembangunan masyarakat menurut Verhagen, 1996, kemandirian masyarakat didefinisikan sebagai suatu kondisi atau keadaan tertentu yang ingin dicapai oleh seorang individu atau sekelompok orang dalam mengamankan kepentingan dirinya agar tidak lagi bergantung pada bantuan pihak ketiga³². Maka kemandirian dapat diartikan sebagai kapasitas atau kemampuan untuk melakukan berbagai upaya untuk mencapai kehidupan yang lebih sejahtera dengan mengoptimalkan potensi yang dimiliki tanpa harus menggantungkan diri ke pihak lain.

Dalam perspektif pembangunan berkelanjutan menurut Bell dan Morse, ketercapaian partisipasi masyarakat akan menghasilkan kondisi kemandirian dengan beberapa karakteristik³³.

Pertama, memiliki kapasitas diri atau sikap tidak tergantung, masyarakat mampu memenuhi kebutuhan berdasarkan potensi yang dimiliki, mampu melakukan kontrol dalam masyarakat dan dapat menyelesaikan masalah yang

³² Kiki Endah, “*Mewujudkan Kemandirian Desa Melalui Pengelolaan Badan Usaha Miliki Desa*”, (MODERAT: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan, 2018), vol. 4, no. 4, hlm. 28.

³³ Ayu Diah Amalia dan M. Syawie, “*Pembangunan Kemandirian Desa Melalui Konsep Pemberdayaan: Suatu Kajian dalam Perspektif Sosiologi*”, (Sosio Informa, 2015), vol. 1, No. 2, hlm. 181-182.

sedang dihadapi. Secara ekonomi masyarakat mampu untuk menghasilkan produksi dan pendapatan untuk memenuhi kebutuhan hidup.

Kedua, memiliki tanggung jawab kolektif. Masyarakat dapat mengembangkan jaringan sosial dan kerjasama atau kemitraan baik di dalam internal maupun eksternal masyarakat. Dengan begitu masyarakat dapat mengakses berbagai peluang yang memungkinkan untuk mengatasi permasalahan dan memenuhi kebutuhan hidup.

Ketiga, memiliki kemampuan berfikir dan bertindak secara berkelanjutan. Masyarakat memiliki wawasan akan lingkungan sehingga mampu menjaga kualitas lingkungan dan memelihara pelayanan serta sumber daya secara berkelanjutan.

Kemandirian merupakan suatu konsep yang berkaitan dengan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. Hal tersebut sejalan dengan tujuan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat yaitu memandirikan dan memampukan masyarakat dalam mengatasi permasalahan mereka demi tercapainya kesejahteraan dan peningkatan kualitas hidup. Dalam konteks ini, kemandirian dimaknai sebagai upaya yang dilakukan oleh masyarakat setempat melalui kapasitas yang dimiliki supaya mampu untuk mendayagunakan inisiatif atau prakarsa, kemampuan, serta gerakan secara kolektif dalam mengembangkan sumber-sumber potensi dan aset baik dalam bentuk fisik maupun nonfisik yang dimiliki oleh suatu daerah.

Selaras dengan pemaknaan tersebut maka terdapat tiga sektor yang menjadi fokus dalam usaha merealisasikan kemandirian dalam suatu wilayah³⁴. Pertama, potensi ekonomi. Hal ini menjadi bagian terpenting dalam usaha peningkatan taraf hidup masyarakat. Kedua, potensi sosial yang merujuk pada

³⁴ Irfan Nursetiawan, “*Strategi Pengembangan Desa Mandiri Melalui Inovasi BUMDES*”, (MODERAT: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan, 2018), vol. 4, no. 2, hlm. 72-81.

ketersediaannya tenaga kerja yang berasal dari masyarakat yang mempunyai keterampilan dan kompetensi di beberapa sektor, sehingga dapat dilakukan adanya pemberdayaan dan pelibatan. Dan ketiga, adalah peningkatan potensi Sumber Daya Manusia (SDM).

Kemandirian masyarakat adalah suatu keadaan yang dialami oleh masyarakat yang ditandai dengan kemampuan berpikir, memutuskan dan melakukan apa yang dianggap tepat untuk mencari solusi dari permasalahan, dengan upaya keterampilan kognitif, psikomotorik, konatif dan keterampilan afektif dengan menggunakan sumber daya yang dimiliki oleh lingkungan internal masyarakat³⁵. Oleh karena itu, untuk menjadi mandiri diperlukan dukungan keterampilan berupa sumber daya manusia yang utuh, menggunakan keadaan kognitif, konatif, psikomotor dan afektif serta sumber daya fisik lainnya.

Kondisi kognitif pada hakikatnya merupakan kemampuan berpikir yang dilandasi oleh pengetahuan dan wawasan seseorang atau masyarakat dalam rangka mencari solusi atas permasalahan yang dihadapi. Kondisi konatif merupakan suatu sikap perilaku masyarakat yang terbentuk yang diarahkan pada perilaku yang sensitif terhadap nilai-nilai pembangunan dan pemberdayaan. Kondisi afektif adalah merupakan sense yang dimiliki oleh masyarakat yang diharapkan dapat diintervensi untuk mencapai keberdayaan dalam sikap dan perilaku. Kemampuan psikomotorik merupakan kecakapan keterampilan yang dimiliki masyarakat sebagai upaya pendukung masyarakat dalam rangka melakukan aktivitas pembangunan.

³⁵ Ambar Teguh Sulistiyani, “*Kemitraan dan Model-Model Pemberdayaan*”. (Yogyakarta: Gava Media, 2004), hlm 80.

1.6.4 Hubungan Antar Konsep

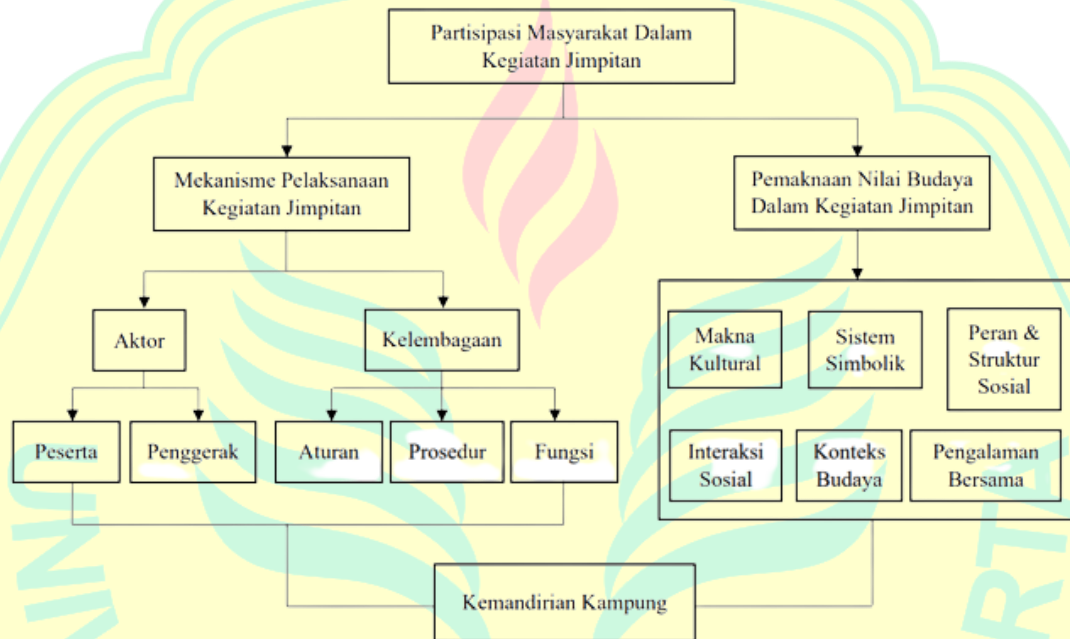
Beberapa konsep yang telah dijabarkan mulai dari konsep partisipasi masyarakat, kegiatan Jimpitan dan kemandirian memiliki keterkaitan satu sama lain dalam penelitian ini. Kegiatan Jimpitan menjadi bagian dari bentuk iuran dana masyarakat Kampung Jimpitan KB2. Seiring perkembangannya, kegiatan Jimpitan dengan cepat membantu peningkatan kesejahteraan dan kualitas kampung. Perkembangan kegiatan Jimpitan tidak lepas dari peran aktif masyarakatnya sehingga Jimpitan dapat menghasilkan dampak terhadap kemandirian kampung.

Kegiatan Jimpitan dapat dikatakan sebagai tradisi atau sebuah kebudayaan yang sudah ada dan dijalankan oleh masyarakat Indonesia sejak dahulu. Kegiatan Jimpitan pada masyarakat Kampung Jimpitan KB2 sangat lekat dengan unsur budaya yang ada pada Jimpitan. Masyarakat Kampung Jimpitan KB2 berpartisipasi aktif dalam kegiatan Jimpitan juga dipengaruhi oleh nilai-nilai budaya yang ada pada kegiatan tersebut. Dalam hal memahami partisipasi masyarakat dalam kegiatan Jimpitan dapat dilakukan menggunakan pendekatan budaya. Dalam budaya penting untuk memahami terkait makna yang berada di balik tindakan serta simbol-simbol dalam budaya tersebut yang akhirnya menciptakan masyarakat berpartisipasi aktif dalam kegiatan tersebut.

Kegiatan Jimpitan melibatkan aktif peran masyarakat dalam proses perencanaan, pelaksanaan, sampai pemanfaatan hasil. Masyarakat yang menghidupkan, menggerakkan dan melaksanakan kegiatan budaya seperti pada kegiatan Jimpitan. Keterlibatan aktif masyarakat menjadi penting untuk keberlanjutan kegiatan yang dilaksanakan. Kegiatan Jimpitan yang berjalan berkelanjutan ini menghasilkan manfaat bagi masyarakat kampung khususnya dalam menciptakan kemandirian kampung. Kemandirian itu dihasilkan secara mandiri dan bertahap. Masyarakat Kampung Jimpitan KB2 secara mandiri mampu mengelola lingkungan kampung dari hasil pemanfaatan Jimpitan yang

bertujuan untuk meningkatkan kualitas serta kesejahteraan hidup masyarakatnya.

Skema 1.1 Hubungan Antar Konsep



Sumber: Hasil Intepretasi Penulis (2022)

1.7 Metodologi Penelitian

1.7.1 Pendekatan dan Metodologi Penelitian

Dalam penelitian ini, metodologi yang digunakan oleh peneliti adalah metodologi penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang digunakan untuk menggali dan memahami makna dari individu atau kelompok orang pada suatu permasalahan sosial atau manusia³⁶. Penelitian kualitatif dapat digunakan untuk mengkaji sejarah, tingkah laku, kondisi kehidupan masyarakat, fenomena atau konsep, masalah sosial, dan lain-lain³⁷. Metodologi penelitian kualitatif digunakan dalam penelitian ini untuk

³⁶ John W. Creswell, *“Research Design: Pendekatan Kualitatif, Kualitatif dan Mixed”*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013), hlm. 4

³⁷ *Ibid.*, hlm. 5.

mengeksplorasi lebih dalam mengenai partisipasi masyarakat dalam kegiatan Jimpitan yang menghasilkan kemandirian dalam sebuah kampung.

Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian jenis studi kasus. Pendekatan studi kasus adalah penelitian kualitatif yang berusaha mengeksplorasi suatu kasus atau berbagai kasus dengan mengumpulkan data secara detail dan mendalam melalui berbagai macam sumber informasi berdasarkan waktu dan tempat yang telah ditentukan³⁸. Kasus yang dimaksud dapat dikaji dari sebuah peristiwa, program, aktivitas maupun suatu individu³⁹. Berdasarkan hal tersebut maka peneliti berusaha untuk mengeksplorasi kegiatan Jimpitan dengan mengumpulkan berbagai macam informasi melalui pengumpulan data dengan berbagai prosedur yang sesuai.

1.7.2 Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini akan dilakukan di Kampung Jimpitan KB2 yang berlokasi di Jalan Pembangunan I Batujaya Utara, RT 03 RW 03, Kelurahan Batujaya, Kecamatan Batuceper, Kota Tangerang. Lokasi penelitian dipilih karena Kampung Jimpitan KB2 menjadi salah satu kampung yang berhasil dalam penerapan kegiatan Jimpitan. Keberhasilan kegiatan Jimpitan tidak terlepas dari peran masyarakat dalam pelaksanaannya. Penelitian ini dilaksanakan pada bulan Oktober 2022 sampai dengan bulan Januari 2023.

1.7.3 Subjek Penelitian

Subjek penelitian dalam kualitatif terdiri dari beberapa informan atau narasumber. Informan atau narasumber adalah orang yang dapat memberikan informasi mengenai situasi dan kondisi terkait tempat yang sedang diteliti⁴⁰. Informasi yang diperoleh dari informan atau narasumber dapat dijadikan

³⁸ John W. Creswell, *“Penelitian Kualitatif & Desain Riset, Memilih di antara Lima Pendekatan”*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2014), hlm. 135

³⁹ John W. Creswell, *Op.cit.*, hlm. 61.

⁴⁰ Lexy J. Moeleong, *“Metodologi Penelitian Kualitatif”* (Bandung: Remaja Rosda Karya, 2010), hlm 132.

sebagai sumber data yang diperlukan dalam proses penelitian. Informan penelitian ini meliputi beberapa macam, seperti, 1) Informan Kunci (*Key Informan*) adalah mereka yang memiliki dan mengetahui berbagai informasi pokok yang dibutuhkan dalam penelitian; 2) Informan Utama adalah mereka yang secara langsung terlibat dalam interaksi sosial yang diteliti; 3) Informan Tambahan adalah mereka yang secara tidak langsung terlibat dalam interaksi sosial yang diteliti tetapi juga dapat memberikan informasi⁴¹.

Berdasarkan hal di atas, subjek dari penelitian ini adalah masyarakat Kampung Jimpitan KB2. Pada penelitian ini yang akan menjadi informan kunci (*key informan*) adalah Ketua RT 03. Sementara untuk Informan utama adalah kepengurusan RT dan masyarakat yang bertugas menjadi petugas Jimpitan. Peneliti juga menjadikan warga biasa di Kampung Jimpitan KB2 sebagai informan tambahan guna mendukung pengumpulan data yang dibutuhkan dalam penelitian ini.

1.7.4 Peran Peneliti

Dalam penelitian kualitatif, peneliti berperan sebagai instrumen kunci dari penelitian itu sendiri. Peneliti sebagai pelaku dari penelitian berusaha mencari informasi mengenai keterlibatan masyarakat dalam kegiatan Jimpitan. Peneliti turun langsung ke lokasi penelitian untuk mengumpulkan data secara menyeluruh dengan melakukan wawancara dan observasi. Kemudian peneliti akan menyusun hasil temuan, melakukan analisis terhadap teori dan konsep yang digunakan serta membuat kesimpulan atas hasil temuan dan analisis yang dilakukan.

⁴¹ Bagong Suyonto dan Sutinah, "*Metode Penelitian Sosial*", (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006), hlm 72.

1.7.5 Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dalam penelitian kualitatif dilakukan pada kondisi alamiah (*natural setting*) berupa data primer, dan teknik pengumpulan data biasanya lebih kepada observasi, wawancara mendalam, dan dokumentasi⁴². Sumber data primer adalah kata-kata dan juga tindakan, sedangkan data tambahan berupa data tertulis, foto, atau statistik⁴³. Peneliti melakukan studi lapangan pada objek penelitian untuk mendapatkan data yang akurat, maka peneliti menggunakan beberapa teknik pengumpulan data sebagai berikut.

1. Observasi

Melalui observasi, peneliti dapat mempelajari perilaku serta makna dari perilaku tersebut⁴⁴. Observasi dilakukan melalui pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap fenomena yang ada pada objek penelitian. Penelitian ini menggunakan metode observasi terus-terang dimana peneliti menyatakan secara terus terang bahwa sedang melakukan penelitian kepada sumber data⁴⁵. Peneliti mendatangi langsung kampung Jimpitan KB2 untuk melakukan pengamatan terhadap fenomena dan proses yang terjadi di dalam situasi kampung Jimpitan KB2. Sumber data atau masyarakat kampung Jimpitan KB2 mengetahui sejak awal hingga akhir mengenai aktivitas peneliti.

2. Wawancara

Pada penelitian ini, peneliti menggunakan metode wawancara mendalam (*in dept interview*). Wawancara mendalam merupakan proses untuk mendapatkan informasi dalam penelitian melalui tanya jawab antara pewawancara dengan responden (informan) sambil bertatap muka, baik dengan atau tanpa menggunakan pedoman wawancara dimana pewawancara dan

⁴² Sugiyono, “*Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*”, (Bandung: Alfabeta, 2017), hlm 225.

⁴³ Lexy J. Moeleong, *Op.cit.*, hlm 157.

⁴⁴ *Ibid.*, hlm 226.

⁴⁵ *Ibid.*, hlm 228.

informan terlibat dalam kehidupan sosial yang relatif lama⁴⁶. Peneliti berusaha menggali secara mendalam terhadap suatu topik yang telah ditentukan sebelumnya menggunakan bantuan pedoman wawancara dengan pertanyaan terbuka.

3. Dokumentasi

Dokumentasi dalam penelitian kualitatif menjadi pelengkap dan pendukung data-data yang telah diperoleh dari observasi maupun wawancara. Dokumentasi yang digunakan pada penelitian ini dapat berupa tulisan maupun gambar. Dokumen tersebut seperti peraturan-peraturan, catatan harian, notulen rapat dan foto-foto yang berkaitan dengan Kampung Jimpitan KB2. Melalui dokumen tersebut peneliti dapat menggunakannya untuk menggali data yang berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan Jimpitan pada Kampung Jimpitan KB2.

1.7.6 Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan proses mencari dan menyusun data yang diperoleh dari hasil pengumpulan data secara sistematis dengan cara mengorganisasikan data kemudian memilih data mana yang penting dan perlu dipelajari serta membuat kesimpulan sehingga dapat mudah dipahami⁴⁷. Penelitian ini menggunakan analisis data versi Miles dan Huberman yang terdapat tiga aktivitas di dalamnya yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan⁴⁸

1. Reduksi data diartikan sebagai proses merangkum, memilih dan memilah, memfokuskan hal-hal yang pokok dan penting pada data utuh yang diambil dari catatan lapangan. Reduksi data dapat dilakukan dengan membuat ringkasan, kategorisasi, mengkode, menulis memo, dan lain sebagainya untuk menyisihkan data yang kurang relevan. Dengan melakukan reduksi data maka

⁴⁶ H.B. Sutopo. “*Metodologi Penelitian Kualitatif (Dasar Teori dan Terapannya Dalam Penelitian)*”, (Surakarta: Sebelas Maret Press, 2006), hlm. 72.

⁴⁷ Sugiyono, *Op.cit.*, hlm. 244.

⁴⁸ Sugiyono, *Op.cit.*, hlm. 247-253.

dapat memberikan gambaran yang lebih jelas dan mempermudah peneliti saat melakukan pengumpulan data selanjutnya atau ketika hendak mencarinya.

2. Penyajian data merupakan langkah selanjutnya setelah mereduksi data. Pada penelitian kualitatif penyajian data yang paling sering digunakan adalah dengan teks yang bersifat naratif yang bertujuan untuk menggabungkan informasi yang tersusun dan mudah dimengerti. Selain dengan teks bersifat naratif, juga dapat berupa grafik, matrik, jejaring kerja (*network*), dan lain sebagainya. Dengan melakukan penyajian data maka akan memudahkan peneliti memahami apa yang terjadi sebelum melakukan penarikan kesimpulan dan merencanakan pengambilan tindakan selanjutnya

3. Penarikan kesimpulan atau verifikasi merupakan langkah terakhir dalam analisis data kualitatif. Kesimpulan pada tahap awal masih bersifat sementara dan dapat berubah jika tidak didukung oleh bukti-bukti yang kuat saat pengumpulan data berikutnya. Namun apabila kesimpulan tahap awal didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten pada saat peneliti kembali lagi ke lapangan maka kesimpulan yang dikemukakan menjadi kredibel. Peneliti menarik kesimpulan berdasarkan dari data yang telah diuji kebenaran dan validitasnya.

1.7.7 Triangulasi Data

Triangulasi dalam penelitian kualitatif dilakukan untuk memeriksa dan mengecek keabsahan data. Triangulasi sebagai pengujian kredibilitas berarti melakukan pengecekan data dengan berbagai sumber dari berbagai cara dan berbagai waktu. Maka terdapat beberapa triangulasi seperti triangulasi sumber, triangulasi teknik pengumpulan data, dan triangulasi waktu⁴⁹. Pada penelitian ini menggunakan jenis triangulasi sumber dan teknik. Triangulasi sumber dilakukan untuk menguji kredibilitas dengan cara memperoleh data dari

⁴⁹ Sugiyono, *Op.cit.*, hlm. 273.

berbagai sumber yang masih terkait satu sama lain. Peneliti melakukan pengecekan dan membandingkan data hasil wawancara dengan informan lainnya yang masih saling terkait.

Triangulasi teknik yang dilakukan dalam penelitian ini dengan cara mengecek data dari sumber yang sama dengan menggunakan teknik yang berbeda. Peneliti menggali kebenaran data atau informasi tertentu dengan berbagai teknik, misalnya data atau informasi yang diperoleh dari hasil wawancara kemudian di cek kembali dengan melakukan observasi maupun dengan dokumen tertulis, arsip, catatan atau tulisan pribadi serta gambar dan foto. Penggunaan triangulasi ini dilakukan untuk pengecekan data terhadap keabsahannya.

1.8 Sistematika Penulisan

BAB I: Pada bab ini akan menguraikan latar belakang masalah, permasalahan penelitian, tujuan dan manfaat penelitian. Selain itu, bab ini akan menguraikan beberapa tinjauan penelitian sejenis, menjelaskan kerangka konseptual yang digunakan, metodologi penelitian, serta sistematika penulisan pada penelitian ini.

BAB II: Pada bab ini akan memaparkan mengenai gambaran umum dari Kampung Jimpitan KB2 yang mencakup kondisi lingkungan dan kondisi sosial masyarakat. Selain itu, akan memaparkan sejarah kegiatan Jimpitan, mekanisme kegiatan Jimpitan yang mencakup proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan dan pengendalian, serta profil informan.

BAB III: Pada bab ini akan memaparkan hasil dan temuan-temuan penelitian di lapangan terkait implementasi kegiatan Jimpitan mulai dari identifikasi awal kegiatan Jimpitan dalam membangun iklim sosial, Jimpitan sebagai *output* fundamental dalam pengembangan kampung, partisipasi masyarakat dalam kegiatan Jimpitan, serta dampang kegiatan Jimpitan bagi masyarakat Kampung Jimpitan KB2.

BAB IV: Pada bab ini peneliti akan memadukan hasil temuan di lapangan yaitu potret partisipasi masyarakat dalam kegiatan Jimpitan dengan konsep yang saling berkaitan seperti partisipasi masyarakat dalam pendekatan budaya dan konsep kemandirian masyarakat.

BAB V: Pada bab ini akan menyimpulkan hasil dari penelitian yang telah dirumuskan berupa jawaban atas pertanyaan-pertanyaan penelitian dan saran baik untuk akademisi atau praktisi maupun untuk masyarakat.

